



JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN KEUANGAN

VOL 4 NO 2 September 2021

P-ISSN 2622-2191 , E-ISSN 2622-2205

PELAKSANAAN TATA KELOLA PADA PT BPRS BOBATO LESTARI KOTA TIDORE KEPULAUAN

Titiek Arafiani Ruray¹ Muhammad Yasin Majojo²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Nuku^{1,2}

titiekruraynuku@gmail.com¹ majojo571@gmail.com²

Info Artikel :

Diterima : 2 September 2021

Disetujui : 16 September 2021

Dipublikasikan : 23 September 2021

ABSTRAK

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bobato Lestari akhir-akhir ini semakin berkembang ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah nasabah dan program pemberdayaan UMKM serta beragamnya produk yang ditawarkan kepada nasabah, hal ini menyebabkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada BPRS Bobato Lestari menjadi semakin penting.

Kata Kunci :

Tata Kelola,
Prinsip tata
kelola

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui pelaksanaan Tata Kelola pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bobato Lestari Kota Tidore Kepulauan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus/case studies, dan penentuan informannya dengan menggunakan snowball sampling. Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa PT BPRS Bobato Lestari telah menerapkan lima prinsip dari Good Corporate Governance/ Tata kelola dengan baik setelah pemerintah mengeluarkan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

ABSTRACT

The Islamic People's Financing Bank (BPRS) Bobato Lestari has recently grown, marked by the increasing number of customers and MSME empowerment programs as well as the variety of products offered by customers, this causes the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at BPRS Bobato Lestari to become increasingly important.

Keywords :

Governance,
Governance
principles

The purpose of this study was: to determine the implementation of Governance at the Bobato Lestari Sharia People's Financing Bank, Tidore Islands City. This study uses a qualitative research method with a case study/case study approach, and the information uses snowball sampling.

The results of this study can be concluded that PT BPRS Bobato Lestari has implemented the five principles of Good Corporate Governance after the government issued a financial services authority regulation Number 24/POJK.03/2018 concerning Governance for Islamic People's Financing Banks.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah yang begitu pesat akhir-akhir ini ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah jaringan pelayanan bank syariah dan semakin beragamnya produk, menyebabkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perbankan syariah menjadi semakin penting. GCG yang berfungsi untuk mengantisipasi berbagai macam risiko, baik risiko financial maupun reputasi, penerapan GCG di bank syariah menjadi penting mengingat bank syariah merupakan bank yang menggunakan prinsip profit sharing /keuntungan dibagi bersama antara bank dan nasabah (Akhmad Faozan, 2013).

Kasmir (2014) mencatat bahwa “kontribusi bank syariah dan reformasi tata kelolanya, memberikan harapan dalam memulihkan kredibilitas dan stabilitas pasar, dalam sektor keuangan internasional. hal ini dikarenakan bank syariah tidak memperlihatkan write off yang signifikan, tidak seperti apa yang terjadi di bank konvensional. Sehingga bank syariah dapat bertahan dalam menghadapi krisis global sekalipun.

Pengelolaan bank di Indonesia tidak terlepas dari teori keagenan (*Agency Theory*). Menurut Ahmad Faozan (2013) teori keagenan menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (*agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Pihak manajer (tenaga profesional) sebagai pengelola perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda dengan menyangkut aspek keuangan, pemasaran, teknologi, sumber daya manusia dan sebagainya.

Keistimewaan PT BPRS Bobato Lestari merupakan Bank Milik Swasta yang asal mulanya dari lembaga koperasi berkembang menjadi Bank Pengkreditan (Syariah) daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Sebagai bank yang menjadi Badan Swasta yang dimiliki oleh putra daerah dan merupakan kebanggaan masyarakat, tentu saja tingkat kepercayaan dan harapan masyarakat kepada Bobato Lestari cukup tinggi. Karena keberadaan Bank BPRS Bobato Lestari memiliki prospek yang sangat menjanjikan.

PT BPRS Bobato Lestari yang beroperasi dengan prinsip syariah yang cocok dengan struktur masyarakat kota Tidore Kepulauan khususnya dan Maluku Utara umumnya yang mayoritas muslim, namun demikian konsep perbankan syariah yang dibangun adalah konsep syariah yang universal sehingga tidak terbatas kepada nasabah yang beragama Islam saja namun terbuka untuk semua agama, yang terpenting adalah transaksi yang dijalankan, sumber dana dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam.

Kinerja perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kinerja keuangannya tetapi juga ditentukan sejauh mana keseriusannya dalam menerapkan *Good Corporate Governance*. Berdasarkan latar belakang di atas maka judul penelitian adalah “*Pelaksanaan Tata Kelola Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bobato Lestari Kota Tidore Kepulauan*”.

Fokus Penelitian merupakan fenomena/domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Tata Kelola Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bobato Lestari Kota Tidore Kepulauan? Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Tata Kelola Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bobato Lestari Kota Tidore Kepulauan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan case study. Metode penelitian kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas, fenomena, atau gejala. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan.

Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bobato Lestari Kota Tidore Kepulauan. Waktu penelitian ini di mulai pada bulan Juli sampai September 2021.

Target/Subjek Penelitian

Informan penelitian ini pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bobato Lestari Kota Tidore Kepulauan. Dengan maksud meneliti tata kelola guna mencapai Bank syariah yang unggul dan tangguh. Oleh karena kualitas hasil penelitian ditentukan oleh instrumen penelitian, maka peneliti kualitatif merupakan Human Instrument. Informan dalam penelitian ini adalah Pemegang saham, Manajer BPRS, dan DPS. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *Snowball Sampling*.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

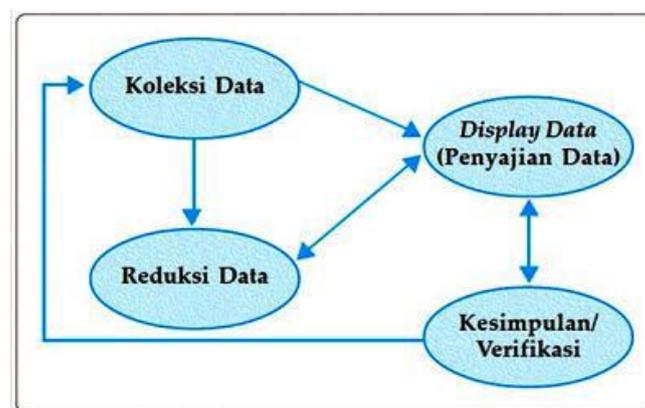
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang ditetapkan (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Bagaimana memaknakan data yang diperoleh, kaitannya dengan permasalahan dan tujuan penelitian, perlu dijabarkan dengan jelas.

(Catatan: Sub-subbab bisa berbeda, menurut jenis atau pendekatan penelitian yang digunakan. Jika ada prosedur atau langkah yang sifatnya sekuensial, dapat diberi notasi (angka atau huruf) sesuai posisinya).

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan pada orang lain (Bogdan, dalam Sugiyono, 2017). Model analisis data dalam penelitian ini adalah model analisis Miles dan Haberman, dalam Pratama, R, 2019) yang dimulai dari tahap reduksi data, display data, dan verifikasi atau kesimpulan. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada Gambar 3.1. berikut:



Gambar 1. Model Interaktif (Miles dan Haberman, 1992)

Penelitian ini di lakukan pada 3 informan penelitian yang memiliki peranan penting di dalam PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bobato Lestari di Kota Tidore Kepulauan, peneliti menggunakan *snowball sampling*. *Snowball sampling* merupakan penentuan sampel ini pertama-tama peneliti memilih satu atau dua orang, tetapi karena dua orang ini belum merasa

lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Tiga informan ini diwawancarai secara terstruktur dan juga melengkapi setiap kekurangan data lapangan dengan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tiga informan ini diwawancarai secara terstruktur dan juga melengkapi setiap kekurangan data lapangan dengan dokumentasi. Adapun informan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Informan	Jabatan	Durasi Wawancara	Lokasi Wawancara
01	Direktur Utama BPRS	30 Menit 10 Detik	Kantor Cabang BPRS Bobato Lestari
02	Direktur Oprasional	08 Menit 43 Detik	
03	Kabag Manajemen Risiko	20 Menit 20 Detik	

Sumber: *Transkrip Observasi 2021*

Setelah transkrip disusun sesuai dengan hasil pengamatan dan wawancara mendalam, peneliti melanjutkan dengan membuat pengkodean data (coding data). Coding data memegang peranan penting dalam proses analisis data dan menentukan kualitas abstraksi data hasil penelitian. Menurut Charmaz (2006) dalam Maziyya (2014) coding adalah sebuah proses dimana data penelitian dikategorisasi atau dikelompokkan dengan nama yang lebih singkat yang juga menunjukkan kesamaan dengan data yang lain. Coding juga memperlihatkan bagaimana data penelitian dipisahkan, dipilih, dan diurutkan oleh peneliti untuk memulai proses analisis. Adapun tahapan-tahapan dalam proses pengkodean yang peneliti gunakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Glaser (1992) dalam Setyowati (2010) bahwasannya ada empat tahapan yakni Open Coding, Axial Coding, Selective Coding dan Theoretical Coding.

Berikut adalah hasil selective coding yang peneliti gabungkan antara kategori-kategori dari 2 informan :

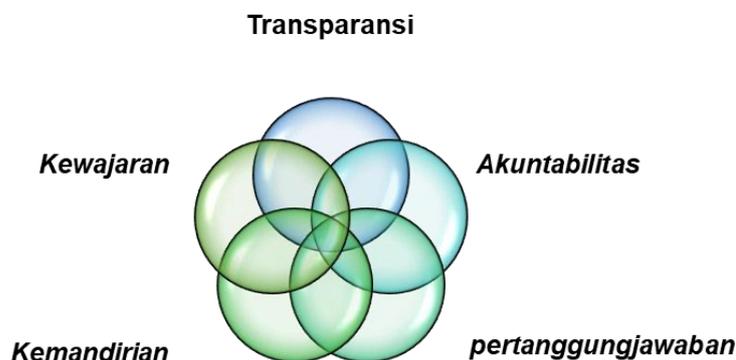
Tabel 1. Kategori-Kategori

No Kategori	Kategori-Kategori	Makna
Gabungan Kategori 1	(1.1.a). tata kelola untuk memaksimalkan operasional dan agar BPRS bisa maju, tumbuh sehat, kuat dan berkembang (2.1.a). tata kelola merupakan menjalankan segala aturan operasional perbankan yang di keluarkan oleh pihak OJK. (3.1.a). tata kelola merupakan aturan atau prosedur dalam sebuah perusahaan/ perbankan.	Tata Kelola Bank yang baik
Gabungan Kategori 2	(1.2.a). jadi penerapan tata kelola di BPRS itu di lakukan dengan segera setelah di terbitkannya aturan undang-undang dari POJK. (2.2.a). semua dunia industri keuangan harus menerapkan tata kelola agar tidak melanggar aturan-aturan yang ada. (3.2.a). semenjak keluarnya peraturan otoritas jasa keuangan	Landasan Hukum

	nomor 24-POJK.03/2018 tentang tata kelola, pihak BPRS pun di haruskan untuk segera menerapkan tata kelola	perbankan Syariah
Gabungan Kategori 3	(1.3.a). sangat penting penerapan tata kelola di BPRS untuk memberikan arah kepada torang sebagai pengelola itu untuk bisa menjadikan BPRS itu dia tumbuh, (2.3.a). sangat penting menerapkan tata kelola di perbankan karena bank sendiri mengelola keuangan masyarakat dan kita berikan kembali pembiayaan jadi harus memang benar-benar di kelola dengan baik. (3.3.a). sangat penting menerapkan tata kelola di BPRS, karena tata kelola merupakan prosedur, kebijakan atau aturan, yang sudah di amanatkan kepada pemulangan Bank yang harus di kelola secara profesional.	Penerapan tata kelola di BPRS
Gabungan Kategori 4	(1.4.a). jika Bank melaksanakan prinsip tata kelola dengan baik dapat meningkatkan kinerja dari Bank itu sendiri dapat membuat Bank itu menjadi sehat dan kuat karena Bank merupakan keuangan suatu negara seperti indonesia. (2.4.a). BPRS telah menerapkan ke lima prinsip tata kelola dengan baik. (3.4.a). karena bagaimanapun juga BPRS ini adalah lembaga keuangan yang ber ada pada wilayah kota Tidore kepulauan jadi kalo segala hal mengenai informasi mengenai lima prinsip seperti: transparansi ,akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kesetaraan harus wajib publikasikan agar masyarakat juga bisa merasakan, tapi memang ada hal-hal tertentu yang tidak bisa di publikasikan.	Menerapkan lima prinsip Tata kelola
Gabungan Kategori 5	(1.5.a). menciptakan suasana kerja yang kompak, harus kuat dan solid (2.5.a). kerja sama antara atasan dan bawahan saling terbuka. (3.6.a). menerapkan sistim kekeluargaan jadi kerja sama antara atasan dan bawahan itu secara organisasi jadi suasana pekerjaan sangat nyaman.	Kerja sama di BPRS
Gabungan Kategori 6	(1.6.a). sampai dengan saat ini tidak pernah terjadi konflik di BPRS apalagi sampai hinga terjadinya konflik dengan lembaga yang lainnya tapi kalau dengan Bisnis itu pasti bersaing. (2.6.a). di perusahaan maupun di perbankan yang namanya konflik itu sudah biasa akan tetapi di BPRS tidak pernah terjadi konflik-konflik yang dapat merugikan pihak BPRS. (3.5.a). jadi sebenarnya kembali kepada diri masing-masing pemahaman tentang <i>job description</i> berarti baginya konflik itu hal biasa yang sering terjadi di perusahaan mana saja.	Konflik di BPRS

Pembahasan

Proses untuk membahas hasil penelitian ini, diilustrasikan menggunakan gambar 4.2. Gambar ini juga merupakan kelanjutan dari proses koding sebelumnya. Gambar 4.2 memberikan dasar untuk tahapan selanjutnya dari selective coding yaitu theoretical coding, dimana pada tahapan ini hasil analisis (06 kategori diatas) dikonfirmasi dengan konsep yang ada, yakni Prinsip *good corporate governance/* Tata kelola.



(Sumber: Topik Pembahasan)

Transparansi

Dalam menerapkan prinsip transparansi, bank syariah harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Bank syariah juga harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tabel 2. Kesesuaian Transparansi dan Hasil Temuan

Kegiatan Transparansi	Hasil Temuan					
	1	2	3	4	5	6
Informasi				√		

Dari tabel 2. di atas menunjukkan bahwa hasil analisis antara keterkaitan deskripsi transparansi dan hasil temuan. Di antaranya yaitu: Pada kegiatan transparansi, informasi sejalan dengan hasil temuan poin (4), sebab berfokus pada informasi material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan agar dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.

“karena bagaimanapun juga BPRS ini adalah lembaga keuangan yang berlokasi di pemerintahan Kota Tidore jadi kalo segala hal mengenai informasi mengenai lima prinsip seperti: transparansi ,akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional,dan kesetaraan harus wajib publikasikan agar masyarakat juga bisa merasakan, tapi memang ada hal-hal tertentu yang tidak bisa di publikasikan”. (Kutipan 3.4.a – informan 03)

Kesesuaian transparansi dengan hasil temuan menunjukkan bahwa ada 4 hasil temuan yaitu: (3) landasan hukum perbankan syariah, (4) penerapan tata kelola di BPRS Bobato Lestari, (5) menerapkan lima prinsip tata kelola (6) kerja sama di BPRS Bobato Lestari.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan usaha bank syariah. Dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, bank syariah sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu, bank syariah harus dikelola secara sehat, terukur, dan professional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lain.

Tabel 3. Kesesuaian Akuntabilitas dan Hasil Temuan

Kegiatan Akuntabilitas	Hasil Temuan					
	1	2	3	4	5	6
Akuntabel				√		

Dari tabel 3. di atas menunjukkan bahwa hasil analisis antara keterkaitan deskripsi Akuntabilitas dan hasil temuan. Di antaranya yaitu: Pada kegiatan Akuntabilitas, akuntabel informasi sejalan dengan hasil temuan poin (4), sebab bank syariah sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel.

“jika Bank melaksanakan prinsip tata kelola dengan baik dapat meningkatkan kinerja dari Bank itu sendiri dapat membuat Bank itu menjadi sehat dan kuat karena Bank merupakan keuangan suatu negara seperti indonesia”.

Kutipan 1.4.a.- informan 01

Kesesuaian akuntabilitas dengan hasil temuan menunjukkan bahwa ada 3 hasil temuan yaitu: (4) penerapan tata kelola di BPRS Bobato Lestari, (5) menerapkan lima prinsip tata kelola, ((6) kerja sama di BPRS Bobato Lestari.

Pertanggungjawaban

Bank syariah harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internal bank serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan *good corporate Governance citizen*. Bank syariah juga harus berpegang pada prinsip kehati-hatian(*prudent*).

Tabel 4. Kesesuaian Pertanggungjawaban dan Hasil Temuan

Kegiatan pertanggungjawaban	Hasil Temuan					
	1	2	3	4	5	6
Pengelolaan bank yang sehat.		√				

Dari tabel 4. di atas menunjukkan bahwa hasil analisis antara keterkaitan deskripsi pertanggungjawaban dan hasil temuan. Di antaranya yaitu:

Pada kegiatan pertanggungjawaban, Pengelolaan bank yang sehat.sejalan dengan hasil temuan point (2) karena bank syariah harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internal bank serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan *good corporate Governance citizen*.

“jadi penerapan tata kelola di BPRS itu di lakukan dengan segera setelah di terbitkannya aturan undang-undang dari POJK”. Kutipan 1.2.a -informan 01

Kesesuaian pertanggungjawaban dengan hasil temuan menunjukkan bahwa ada 5 hasil: (2) tata kelola bank yang baik, (3) landasan hukum perbankan syariah, (4) penerapan tata kelola di BPRS Bobato Lestari, (5) menerapkan lima prinsip tata kelola, (6) kerja sama di BPRS Bobato Lestari.

Kemandirian

Profesional mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan berlaku objektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan dengan penerapan prinsip profesional, bank syariah harus dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Tabel 5. Kesesuaian Kemandirian dan Hasil Temuan

Kegiatan kemandirian	Hasil Temuan					
	1	2	3	4	5	6
profesional					√	

Dari tabel 5. di atas menunjukkan bahwa hasil analisis antara keterkaitan deskripsi kemandirian dan hasil temuan. Di antaranya yaitu:

Pada kegiatan kemandirian, profesional sejalan dengan hasil temuan point (5) karena bank syariah harus dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

“menciptakan suasana kerja yang kompak, harus kuat dan solid”. Kutipan 1.5.a-informan 01

Kesesuaian kemandirian dengan hasil temuan menunjukkan bahwa ada 2 hasil temuan yaitu: (5) menerapkan lima prinsip tata kelola, (7) konflik di BPRS Bobato Lestari.

Kewajaran

Kewajaran mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Tabel 6. Kesesuaian kewajaran Dan Hasil Temuan

Kegiatan kewajaran	Hasil Temuan					
	1	2	3	4	5	6
Keadilan				√		

Dari tabel 6. di atas menunjukkan bahwa hasil analisis antara keterkaitan deskripsi kewajaran dan hasil temuan. Di antaranya yaitu:

Pada kegiatan kewajaran, keadilan sejalan dengan hasil temuan point (4) sebab keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“karena bagaimanapun juga BPRS ini adalah lembaga keuangan milik pemerintah kota Tidore Kepulauan jadi kalo segala hal mengenai informasi mengenai lima prinsip seperti: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kesetaraan

harus wajib publikasikan agar masyarakat juga bisa merasakan, tapi memang ada hal-hal tertentu yang tidak bisa di publikasikan”. Kutipan 3.4.a – informan 03

Kesesuaian kewajaran Dengan hasil temuan menunjukkan bahwa ada 4 hasil temuan yaitu (2). Tata kelola bank yang baik, (3). Landasan hukum perbankan syariah, (5) Menerapkan lima prinsip tata kelola (6). Kerja sama di BPRS.

Keterkaitan Konsep dengan Hasil Temuan

Tabel 7. Gabungan Keterkaitan Hasil Temuan dengan prinsip *good corporate governance*

Kategori	Transparansi	Akuntabilitas	Pertanggungjawaban	Kemandirian	Kewajaran
	A	A	A	A	A
Tata kelola bank yang baik			√		√
Landasan hukum perbankan syariah	√		√		√
Penerapan tata kelola di BPRS Bobato Lestari	√	√	√		
Menerapkan lima prinsip tata kelola	√	√	√	√	√
Kerja sama di BPRS Bobato Lestari	√	√	√		√
Konflik di BPRS Bobato Lestari					

Dari tabel 7. di atas dapat di lihat bahwasannya ada beberapa kategori yang masuk semua konsep, yakni konsep pertanggungjawaban.

Hasil temuan yang berulang menerapkan lima prinsip tata kelola (lima prinsip tata kelola). Ada juga kategori-kategori yang peneliti dapatkan bahwasannya tidak masuk dengan konsep prinsip dari tata kelola, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Kategori 6	Konflik di BPRS Bobato Lestari
-------------------	---------------------------------------

Dari table di atas dapat di lihat bahwa ada satu kategori yang peneliti temukan tidak ada keterkaitannya dengan ke lima prinsip tata kelola. Dengan Hasil ini maka yang di pengaruhi sebagai konflik dalam penerapan tata kelola di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bobato Lestari Kota Tidore adalah:

Kategori 4	Menerapkan Prinsip Tata Kelola
-------------------	---------------------------------------

Hasil penelitian ini dapat di definisikan bahwa PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Bobato Lestari Kota Tidore Kepulauan telah menerapkan lima prinsip dari *Good Corporate Governance/* Tata kelola dengan baik setelah pemerintah mengeluarkan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa PT BPRS Bobato Lestari telah menerapkan lima prinsip dari *Good Corporate Governance/* Tata kelola dengan baik setelah pemerintah mengeluarkan peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yaitu Prinsip Transparansi, Prinsip Akuntabilitas, Prinsip Pertanggungjawaban, Prinsip Kemandirian, dan Prinsip Kewajaran.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan masukan bagi setiap perbankan konvensional maupun syariah agar dapat menerapkan prinsip tata kelola dengan lebih baik lagi agar bank tersebut menjadi lebih sehat dan profesional dalam melayani.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Faozan, 2013. Implementasi Good Corporate Governance dan peran dewan pengawas syariah di bank syariah. Jurnal ekonomi islam. Vol VII No.1.
- Kasmir. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi revisi.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3(4), 305-360.
- Pratiwi, (2016). Pengaruh kualitas penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2010-2015). Al-Tijary, 2(1), 55-76
- Asmara, R. (2017). Pergeseran Paradigma Pengungkapan Perusahaan. Jurnal Akuntansi Bisnis, 1(1).
- Pratiwi, (2016). Pengaruh kualitas penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2010-2015). Al-Tijary, 2(1), 55-76
- Pratama, R., & Samiun, A. A. (2019). Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet Pada PT BPRS Bobato Lestari. Jurnal Mitra Manajemen, 3(9), 932-945
- Aprianingsih, A. (2016). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. Jurnal Profita, 5, 1-16.
- Maradita, A. (2014). Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. Yuridika, 29(2)
- Siswanti, I. (2016). Implementasi Good Corporate Governance Pada Kinerja. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2012, 307-321.

- Ratnaningsih, S. Y., & Hidayati, C. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Media Mahardhika*, 10(3), 38-65.
- Eksandy, A. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 1–10.
- Sunarwan, E. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia Periode 2010-2013).
- Turuis, T. F. (2017). Analisis Prosedur Pemberian Kredit dengan menggunakan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada PT. Bank Sulutgo. *EFISIENSI*, 17(01).
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & G*. Cetakan ke-26, Bandung, CV Alfabeta
- Miles, M. B. D. A. (1992). Michael Huberman. *Qualitative data analysis: an expanded sourcebook*.